

Penggunaan Komunikasi Dalam Mengatasi Isu Ham Di Proyek Pembangunan Sirkuit Mandalika

Rio Septian¹, Intan Leliana², Achmad Haikal³, Eddy Kusnadi⁴, Gema Irhamdika⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Histori Artikel

Dikirimkan:

25 Juni 2024

Direvisi:

4 Juli 2024

Diterima:

4 Juli 2024

Diterbitkan:

31 Maret 2024

Abstrak - Hak asasi manusia tidak hanya menjadi landasan moral pembangunan berkelanjutan, namun juga merupakan faktor penting dalam memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan menghormati hak-hak individu. Komunikasi yang efektif merupakan sarana untuk mendukung perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia serta menyebarkan informasi mengenai program pembangunan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Teori yang digunakan untuk melengkapi artikel ini adalah teori komunikasi model Claude Shannon dan Weaver yang dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku *The Mathematical/Theory of Communication*. Model Shannon dan Weaver menyoroti masalah penyampaian pesan pada tingkat akurasi. Model ini menggambarkan sumber dari mana pesan itu berasal atau diciptakan dan dikirimkan melalui saluran tersebut kepada penerima dengan harapan dapat lebih efektif mengidentifikasi titik-titik tekanan di mana komunikasi terdistorsi. Sebagai upaya hukum, maka hal tersebut wajib untuk diikuti, dilaksanakan dan dipelihara. Mekanisme penyelesaian yang tidak diskriminatif dan memberikan sanksi atau hukuman kepada pihak yang bersalah secara keadilan hukum dan dilaksanakan sesuai dengan proses hukum yang berlaku.

Abstract - *Human rights are not only the moral foundation of sustainable development, but also an important factor in ensuring that development is fair, inclusive and respects individual rights. Effective communication is a means to support the protection and promotion of human rights and to disseminate information about development programs that can impact people's lives. The theory used to perfect this article is the Claude Shanon and Weaver model of communication theory put forward in 1949 in the book *The Mathematical/Theory of Communication*. Shanon and Weaver's model highlights the problem of conveying messages based on the level of accuracy. This model describes a source that becomes or creates a message and conveys it through a channel to a recipient in the hope that it can more effectively identify pressure points where communication is distorted. As a tool for law enforcement it should be mandatory to obey, implement and uphold. A resolution mechanism that is non-discriminatory and provides sanctions or punishment for the guilty party based on legal justice and carried out according to the correct legal mechanism.*

Kata Kunci

HAM,
ClaudeShanon,
Mandalika

Corresponding Author:

Rio Septian, Universitas Bina Sarana Informatika, DKI Jakarta, Indonesia, 13220, Email: rio.rse@bsi.ac.id



PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah aturan inklusif yang menjaga ketenangan, peluang, dan kebebasan mendasar setiap orang. Pedoman ini umumnya dipahami dalam lingkup lokal global dan terkandung dalam beberapa perjanjian damai, seperti Pernyataan Umum Kebebasan Bersama Negara-Negara Bersatu (PBB) yang diadopsi pada tahun 1948. Kebebasan dasar mencakup hak-hak istimewa, misalnya, kesempatan untuk mendapatkan penilaian, hak atas pengajaran, hak untuk hidup dan pilihan untuk dibebaskan dari siksaan. (Alvin Hamidah dkk., 2023). Sedangkan pembangunan adalah upaya negara dan organisasi internasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan peningkatan akses terhadap infrastruktur. Komunikasi, di sisi lain, merupakan bagian penting dalam mendorong keberlanjutan. Komunikasi yang efektif memungkinkan pertukaran informasi, pengetahuan dan pemahaman yang diperlukan untuk membawa perubahan positif dalam masyarakat.

Hubungan antara hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan sangatlah penting. Hak asasi manusia tidak hanya menjadi landasan moral pembangunan berkelanjutan, namun juga merupakan faktor penting dalam memastikan pembangunan yang adil, inklusif dan menghormati hak-hak individu. Komunikasi yang efektif merupakan sarana untuk mendukung perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia serta menyebarkan informasi mengenai program pembangunan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Namun, integrasi hak asasi manusia dan komunikasi pembangunan seringkali disertai dengan kontradiksi dan tantangan. Banyak negara menghadapi hambatan dalam pertukaran informasi yang terbuka dan kritis mengenai isu-isu hak asasi manusia, terutama ketika aktor pemerintah atau non-negara telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Di sisi lain, terdapat juga permasalahan dalam memastikan komunikasi pembangunan mencakup seluruh lapisan masyarakat dan tidak meninggalkan kelompok rentan dan marginal.

Salah satu tantangan yang sering muncul dalam permasalahan hak asasi manusia, misalnya dalam proyek pembangunan besar seperti proyek pembangunan lahan parkir, adalah pelestarian dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat lokal yang mungkin terkena dampak proyek tersebut. Proyek pembangunan Jalan Lingkar Mandalika di Indonesia adalah contoh nyata dari ujian ini. Mandalika Metropolitan dan The Travel Industry Foundation Improvement Undertaking adalah proyek peningkatan kerangka industri perjalanan dengan cakupan yang sangat besar di pulau Lombok, Indonesia. Usaha ini merupakan inti dari prosedur pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sepuluh "Bali baru". (Batarags, 2022) Proyek ini merupakan proyek gratis pertama yang dilakukan Asian Framework Speculation Bank (AIIB) di Indonesia, yang memberikan pinjaman sebesar US\$ 248,4 juta, yang merupakan 78,5 persen dari total subsidi. The Indonesian Travel Industry Improvement Organization (ITDC), sebuah organisasi milik negara yang penawarannya sepenuhnya diklaim oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia, menjadi penggerak pelaksanaan proyek Mandalika.

Mandalika Global Dashing Circuit, arena balap sepeda motor, dipromosikan secara gencar sebagai destinasi liburan utama di pulau ini. AIIB mendukung pendanaan untuk proyek Mandalika pada bulan Desember 2018. Sebelum proyek disahkan, permasalahan lahan semakin meluas di wilayah Mandalika. Baik ITDC maupun pemerintah Indonesia telah bergerak maju dalam pengadaan lahan yang terkendala untuk mengantisipasi proyek Mandalika. Terlepas dari perbaikan-perbaikan yang mendesak ini, baik pada tingkat lokal maupun sebagai tradisi dari permasalahan pertanahan brutal yang sah di Lombok, AIIB gagal melakukan upaya-upaya penting yang wajar untuk menghindari, membatasi, atau mengurangi pertarungan pemukiman kembali yang terbatas dan upaya-upaya yang terbatas. mengusir jaringan asli yang terkena dampak. Sejak proyek disahkan, AIIB telah mengalihkan tanggung jawabnya terkait pemenuhan pedoman ekologi dan sosial kepada peminjam, khususnya ITDC. Oleh karena itu, ketidakmampuan AIIB untuk menyetujui persyaratan investasi yang diwajibkan pada tingkat yang wajar berdampak buruk pada wilayah asli Sasak. Untuk menampilkan dampak berkelanjutan terhadap kebebasan finansial dan kebebasan bersama dari proyek Mandalika, Aliansi Pemeriksa Perbaikan Kerangka Kerja Indonesia (KPPH) memimpin penelitian terhadap 105 individu dari kelompok masyarakat yang terkena dampak pada bulan Desember 2022 dan Januari 2023. Kajian tersebut menunjukkan bahwa 98% responden termasuk dalam kelompok masyarakat yang terkena dampak proyek Mandalika. tidak meminta persetujuan mereka. terkait dengan proyek Mandalika. Hanya 6% yang menghadiri pertemuan wawancara yang diadakan oleh ITDC atau AIIB. Angka-angka ini jelas merupakan

pelanggaran terhadap Struktur Ekologis dan Sosial (ESF) AIBB, yang mewajibkan kliennya untuk memimpin pertemuan penting dengan kelompok masyarakat yang terkena dampak dan memberikan "bukti dukungan luas terhadap wilayah setempat" dari Komunitas Asli. ESF AIBB juga melakukan hal yang sama. Menetapkan bahwa dalam keadaan "ketika Bank Dunia tidak dapat menjamin bahwa [...] dukungan luas di wilayah setempat telah diperoleh dari kelompok Penduduk Asli yang Terkena Dampak," kegiatan yang akan mempengaruhi jaringan tersebut harus "dilarang untuk dilakukan".

Faktanya, dalam tinjauan KPPII, 82% responden menyatakan tidak akan memberikan dukungannya terhadap proyek Mandalika. Ketika asosiasi masyarakat umum meminta agar AIBB menghentikan proyek Mandalika karena tidak adanya konferensi besar dan teror terhadap kelompok Masyarakat Asli, AIBB tidak menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika semua hal dianggap sama, AIBB menghapus prinsip-prinsip ini dari ESF-nya tanpa wawancara publik, sehingga melemahkan jaminan bagi jaringan yang terkena dampak proyek-proyek yang didukung AIBB di seluruh dunia. Informasi tinjauan KPPII juga menemukan contoh teror dan tekanan terhadap jaringan yang terkena dampak proyek Mandalika - 70% responden terkena dampak paksaan dan teror dalam proses perolehan tanah. Praktisnya, seluruh responden yang disurvei merasa bahwa mereka tidak ditawari pembayaran yang adil dan memadai atas properti, rumah, dan hasil panen mereka yang dibeli atau dimusnahkan akibat proyek Mandalika. Karena kurangnya lahan dan akses ke laut serta aset rutin lainnya, banyak penduduk sekitar yang terpaksa mengungsi demi menghidupi keluarga mereka. Tidak diragukan lagi, sejak diluncurkan, upaya untuk mendukung proyek Mandalika telah benar-benar mendorong jaringan yang terkena dampak semakin jauh ke dalam ketidakstabilan pangan dan kemiskinan yang parah.

KAJIAN LITERATUR

Dalam Kasus Penggunaan Komunikasi Dalam Mengatasi Isu Ham Di Proyek Pembangunan Sirkuit Mandalika, pada dasarnya seperti yang dikemukakan (Shannon, 1948) bahwa masalah dasar komunikasi adalah pengulangan pesan yang dikirim dari satu titik ke titik lain, baik secara tepat maupun kurang lebih. Dengan menggunakan teori komunikasi matematis ini, diharapkan dapat lebih efektif mengidentifikasi titik-titik tekanan di mana komunikasi terdistorsi. (Drew, 2023). Yang menjadikan gambaran suatu sumber yang menjadi pesan dan menciptakan pesan dan memberikan respon kepada penerima. Simon dalam Usman mengungkapkan, siklus korespondensi merupakan sumber utama perselisihan. Ada berbagai cara untuk menunjukkan kekuatan pergaulan di dalamnya, dimana setiap individu mempunyai cara bertindak tersendiri terhadap komunikator sehingga orang tersebut mempunyai kemampuan untuk menyelamatkannya dari perjuangan.

Joseph Dominick (Onong Uchjana Effendy, 2009) menyatakan bahwa dalam acara korespondensi terdapat delapan komponen yang terkandung di dalamnya, antara lain :

- a. Sumber (komunikator) adalah tempat dimana suatu pemikiran atau pemikiran akan disampaikan kepada pihak lain, yaitu penerima pesan tersebut. Sumber pengirim pesan ini memiliki validitas yang tinggi karena dapat berdampak pada penerima pesan.
- b. Pengkodean merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang memberi kesan memberi makna pada renungan atau pemikirannya dengan tujuan agar nantinya dapat ditangkap oleh perasaan orang yang menerima pesan tersebut. Pengkodean juga dapat diartikan sebagai siklus yang terjadi di otak untuk menyampaikan pesan.
- c. Pesan merupakan hasil interaksi pengkodean yang dapat diterima oleh fakultas dan setiap penerima pesan mempunyai kendali tersendiri atas berbagai pesan yang diterima.
- d. Saluran adalah suatu cara yang ditempuh suatu pesan untuk sampai pada penerima pesan.
- e. Decoding adalah suatu gerakan yang berencana untuk mengubah pesan aktual menjadi sebuah struktur yang memiliki arti penting bagi penerima pesan tersebut.
- f. Penerima manfaat (komunikasi) adalah tujuan pesan yang disampaikan. Penerima manfaat juga dapat disebut sebagai kumpulan orang-orang yang belum tentu mempunyai reaksi yang sama terhadap setiap pesan yang mereka terima.
- g. Umpan balik merupakan reaksi atau reaksi yang diberikan oleh penerima pesan dengan membentuk dan mengubah pesan sehingga akan dihargai oleh komunikator. H. Impedansi adalah segala sesuatu yang

mengganggu cara paling umum dalam mengkomunikasikan sesuatu yang spesifik. Obstruksi sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu impedansi semantik (berbagai implikasi kata atau artikulasi yang serupa), obstruksi mekanis (campur aduk yang muncul dari alat penyampai pesan), dan obstruksi ekologis (mulai dari luar kendali pengirim atau pengirim pesan). penerima pesan).

METODE PENELITIAN

Hipotesis yang digunakan untuk menyelesaikan artikel ini adalah hipotesis korespondensi model Claude Shannon dan Weaver yang dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku *The Numerical/Hypothesis of Correspondence*. Model ini sering kali disebut model numerik atau model hipotesis korespondensi dan dikenal sebagai model terbaik dibandingkan dengan model korespondensi atau spekulasi lainnya. Model Shannon dan Weaver menampilkan masalah penyampaian pesan pada tingkat presisi. (Amanah, 2010)

Model ini menggambarkan sumber yang berubah menjadi pesan atau membuat pesan dan mengirimkannya melalui saluran ke penerima pesan atau mereproduksi pesan. Dengan demikian, model Shannon dan Weaver mengharapkan sumber informasi menghasilkan pesan yang dikirimkan atau dikirimkan oleh pengirim. (Angriana, 2017).

PEMBAHASAN

Proyek Perbaikan Sirkuit Mandalika, yang terletak di Pulau Lombok, Indonesia, merupakan proyek perbaikan besar yang bertujuan untuk mengembangkan trek balap global dan kerangka pendukungnya. Upaya ini diharapkan membawa keuntungan finansial bagi lingkungan sekitar, seiring dengan berkembangnya lapangan kerja dan industri perjalanan. Namun tugas ini juga memunculkan kebebasan-kebebasan dasar yang harus diperhatikan dan dijaga dengan sungguh-sungguh. Pakar kebebasan umum Negara-Negara Gabungan (PBB) berpendapat bahwa proyek Mandalika di Nusa Tenggara Barat memberikan indikasi perampasan tanah standar. Olivier De Schutter, Pelapor Luar Biasa PBB untuk kemiskinan dan kebebasan dasar, mengatakan para peternak dan pemancing diusir dari rumah mereka. (Adyatama, 2021).

Salah satu isu kebebasan dasar yang mengemuka terkait proyek pembangunan Jalan Lingkar Mandalika adalah keistimewaan jaringan lingkungan masyarakat asli. Pulau Lombok memiliki banyak jaringan adat yang sudah cukup lama tinggal di sana. Proyek ini dapat mempengaruhi kebebasan mereka atas tanah, aset alam, dan iklim. Dikutip dari Kompas.com, Olivier De Schutter mengatakan penghuni di dekatnya terancam bahaya, diteror, dan secara efektif diusir dari properti mereka tanpa imbalan atau penyelesaian masalah tanah. Meski begitu, Perwakilan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang/Organisasi Pertanahan Umum (ATR/BPN) Teuku Taufiqulhadi membantah tuduhan PBB. Taufiq mengatakan, apa yang didakwakan terkait tindakan pengambilan dan pemindahan tanah di Mandalika adalah tidak benar, tidak beralasan, dan tidak terjadi di lapangan. Padahal, selama ini pelaksanaan pembangunan The Mandalika, termasuk pengadaan tanah, juga telah diamati secara gamblang oleh Komnas HAM dan tidak ada tuduhan pelanggaran terhadap kebebasan bersama sama sekali. (Alvin Hamidah dkk., 2023)

Komnas HAM, kata Taufiq, juga tidak pernah menyatakan adanya terjadi pelanggaran HAM di The Mandalika. Jika ada pelanggaran HAM tentu saja sudah terjadi gejala di sana. Masyarakat akan protes beramai-ramai, menurutnya. Dikutip dari Bbc.com, Damar seorang warga asli Desa Kuta, yang tempat tinggalnya hanya sekitar 500 meter dari proyek sirkuit mandalika, menyuarakan pendapatnya dengan cukup vokal terhadap ketidakadilan yang dirasakan dirinya dan sanak saudaranya yang tinggal di lahan seluas sekitar 3300 m². (Ham, 2023). Damar mengatakan bahwa pertemuan pertama kali dengan pemerintah pada tahun 2019 mereka langsung berkata bahwa Damar harus mengosongkan lahan rumahnya tersebut pada bulan Agustus 2019. Damar pun bingung, karena sebelumnya belum ada sosialisasi dan musyawarah antara warga dengan pemerintahan.

Pada akhirnya Damar pun terpaksa untuk mengosongkan lahan rumahnya itu, dengan mahar 3.2 miliar. Namun, menurutnya harga tersebut tidak sebanding dengan upayanya untuk memulai hidup baru dan kesedihan meninggalkan desa yang telah berusaha ia bangun selama bertahun-tahun. VP Corporate Secretary ITDC, Miranti Rendranti, menyayangkan penilaian tersebut. Ditegaskan mitra kerja ITDC, khususnya Asian Framework Venture Bank (AIFB), melalui pernyataan publik, proyek Mandalika sedang diselesaikan dan diawasi dengan ketat untuk menjamin pelaksanaan pembangunan, salah satunya sirkuit MotoGP, dapat berjalan sesuai rencana. peraturan dan pedoman yang bersifat material (Luas dkk., 2020). Beliau menjamin pembangunan Mandalika telah selesai sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku serta tetap menjaga nilai perlindungan alam dan kebebasan bersama. Miranti yakin proyek The Mandalika akan memberikan manfaat positif yang luar biasa bagi industri pariwisata dan bantuan pemerintah kepada masyarakat NTB, khususnya Focal Lombok, dalam jangka panjang.

Beliau juga menjamin langkah pengadaan tanah secara menyeluruh di kawasan Mandalika yang telah dilakukan telah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku, serta sesuai dengan Peraturan No. 2 Tahun 2012, Pengamanan Tanah Untuk Kemajuan Kepentingan Umum (Samsol dkk., 2021). Oleh karena itu, sangat penting untuk menjamin keberhasilan dan korespondensi yang komprehensif antara mitra proyek, pemerintah dan jaringan terdekat untuk mengurangi kemungkinan dampak pesimistis dan menjamin penghormatan terhadap hak-hak istimewa kelompok masyarakat adat.



Sumber: (Subaidi, 2023)

Gambar 1. Sirkuit Mandalika

Selain permasalahan awal, proyek ini juga berdampak pada hak pekerja dan hak lingkungan hidup. Saat melaksanakan suatu proyek konstruksi, pekerja proyek memerlukan kondisi kerja yang aman dan layak. Selain itu, pembangunan infrastruktur dapat berdampak pada lingkungan, seperti kualitas air dan tanah. Oleh karena itu, proyek harus memastikan bahwa standar hak asasi manusia dihormati dalam konteks ini dan berkomunikasi secara efektif dengan seluruh pemangku kepentingan (Imarshan, 2021). Dengan asumsi kita menyinggung hipotesis yang digunakan untuk menyelesaikan artikel ini, itu adalah model hipotesis korespondensi Claude Shannon dan Weaver yang dikemukakan pada tahun 1949 dalam buku *The Numerical/Hypothesis of Correspondence*. Model ini dalam banyak kasus disebut model numerik atau model hipotesis korespondensi dan dikenal sebagai model terbaik dibandingkan dengan model korespondensi atau spekulasi lainnya.

Model Shannon dan Weaver menampilkan masalah penyampaian pesan pada tingkat presisi. Model ini menggambarkan sumber yang berubah menjadi pesan atau membuat pesan dan mengirimkannya melalui saluran ke penerima pesan atau mereproduksi pesan. Secara keseluruhan, model Shannon dan Weaver mengharapkan sumber informasi menghasilkan pesan yang dikirim atau dikirimkan oleh pengirim. (Anggriana, 2017). Pemancar/penerima mengubah pesan menjadi tanda yang sesuai dengan saluran yang digunakan. Saluran merupakan media yang mengkomunikasikan sinyal/karakter dari sumber kepada penerima/pengumpul. Dalam gadget sumber datanya adalah pikiran, transmitter adalah komponen yang

menghasilkan sinyal/wacana yang dikirimkan melalui udara sebagai saluran penerima/pengumpul, atau sistem suara yang bekerja daripada instrumen suara. Gadget pengirim membuat ulang pesan dari tanda tersebut. Maksud/objektifnya adalah pikiran individu yang menerima pesan tersebut (Anggoro, 2014). Gagasan penting lainnya dalam model Shannon dan Weaver adalah gangguan/keributan, misalnya peningkatan tambahan apa pun yang mengganggu yang mungkin memperlambat ketepatan pesan yang dikirim. Secara bahasa sumber data adalah otak besar, pemancarnya adalah sistem suara yang menghasilkan sinyal (wacana) yang dikomunikasikan melalui udara (sebagai saluran). Penerima manfaat, atau setidaknya, perangkat suara, menjalankan peran sebaliknya sebagai pemancar, khususnya mereproduksi pesan dari tanda. Sasaran (sasaran) adalah pikiran individu yang menerima pesan (Mulyana, 2005).

Jika dikaitkan dengan kasus Sirkuit Mandalika, pada hakikatnya (Shannon, 1948) persoalan pokok korespondensi adalah pengulangan, baik secara tepat maupun kasar, pesan-pesan yang dikirimkan mulai dari satu titik lalu ke titik berikutnya. Dengan memanfaatkan hipotesis korespondensi numerik ini, diyakini bahwa kita dapat lebih mengenali titik-titik tekanan di mana korespondensi diputarbalikkan. (Musfialdy dan Anggraini, 2020). Proyek ini melibatkan perubahan lahan, disertai dengan perpindahan penduduk, penggusuran dan dampak lingkungan. Dalam konteks ini, keterkaitan kasus HAM dengan teori komunikasi Shannon-Weaver dapat kita lihat sebagai berikut:

- a. Sumber (Pengirim): Pemerintah atau pengembang proyek Sirkuit Mandalika mungkin dianggap sebagai sumber pesan. Mereka adalah yang menginisiasi dan merancang proyek ini.
- b. Pesan: Pesan dalam kasus ini adalah rencana pembangunan Sirkuit Mandalika, termasuk segala informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, termasuk perubahan yang akan terjadi di kawasan tersebut. Peneliti KPPI Sayyidatihiyaa Afra dikutip dalam Betahita.id, menjelaskan bahwa konsistensi pemeriksaan aliansi selama lebih dari empat tahun, laporan kajian KPPII mengungkap kenyataan buruk. Banyak warga yang terkena proyek tidak diminta pendapatnya terkait proyek Mandalika. Meski penting bagi wilayah adat Sasak, 98% responden ulasan tidak dimintai persetujuannya. Untuk situasi ini jelas data atau pesan yang disampaikan tidak berfungsi dengan baik sehingga pilihannya tidak merata.
- c. Saluran (Channel): Saluran komunikasi yang digunakan dalam proyek ini mungkin melibatkan berbagai media, seperti pengumuman pemerintah, konferensi pers, media sosial, dan lainnya. Harry Sandy Ame, pakar dari LSBH NTB, mengatakan bahwa penyebab teror, pemiskinan, dan sulitnya kebebasan masyarakat lokal di Mandalika adalah contoh perampasan tanah yang tidak langsung dan bersifat memaksa. Pada tahun 2018, kata Harry, ITDC menjamin 92,7% lahan di kawasan Mandalika 'sempurna dan bersih' dari segala persoalan atau bentrokan pertanahan. Penegasan ini, katanya, berbahaya dan tidak benar.
- d. Penerima: Masyarakat yang tinggal di sekitar Mandalika dan pihak yang terdampak oleh proyek ini adalah penerima pesan. Mereka adalah yang akan merasakan dampak dari proyek ini. Intimidasi terhadap jaringan lokal terus diabaikan oleh AIB, yang mengizinkan kliennya, Organisasi Peningkatan Industri Perjalanan Indonesia (ITDC), serta pemerintah Indonesia, untuk melakukan pelanggaran tanpa tanggung jawab. AIB dalam situasi ini gagal menyelesaikan investasi pada tingkat yang wajar dan penting untuk menghindari, membatasi, atau mengurangi risiko penggusuran jaringan lokal yang terkena dampak secara terbatas. Sejak pengesahan proyek, AIB belum menyelesaikan pemeriksaan yang memadai dan meminta ITDC untuk menyetujui norma-norma asuransi alam dan sosial Bank Dunia yang berdampak pada kelompok Masyarakat Asli Sasak.
- e. Noise (Gangguan): Gangguan dalam komunikasi bisa saja muncul, seperti ketidaksetujuan masyarakat, protes, atau informasi yang bertentangan. Informasi dan deklarasi kuantitatif juga menunjukkan bahwa jaringan yang terkena dampak proyek terus berjuang melawan dampak finansial yang ekstrim dari proyek perbaikan yang terpaksa dilanjutkan tanpa persetujuan mereka. Sebanyak 79% responden menyatakan

mereka menghadapi tantangan keuangan karena proyek Mandalika. Kurangnya lahan, akses ke laut dan aset-aset normal telah menyebabkan jaringan yang terkena dampak proyek terjebak dalam layanan air untuk merawat keluarga dan anak-anak mereka yang putus sekolah. Berbagai efek ini sangat mampu dilakukan oleh wanita.

- f. **Feedback:** Feedback dari masyarakat terkait proyek ini penting untuk menilai dampaknya, memperbaiki komunikasi, dan memastikan pemenuhan HAM. Jika pihak yang terdampak tidak merasa didengar, kasus HAM dapat muncul. Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien menambahkan, keluarga yang efektif pindah harus mendapat jaminan mendapat upah dan reklamasi atas tanah, rumah, dan pekerjaan yang hilang akibat proyek Mandalika, serta dampak buruk yang mereka hadapi.

Dalam konteks kasus hak asasi manusia, komunikasi yang efektif antara pemerintah, pengembang dan masyarakat sangatlah penting. Gangguan atau masalah komunikasi dapat menyebabkan perubahan yang berdampak pada hak asasi manusia, seperti hak atas tanah, pemindahan paksa, atau dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, teori komunikasi seperti model Shannon-Weaver dapat membantu untuk memahami peran komunikasi dalam pengembangan proyek besar seperti Sirkuit Mandalika dan dampaknya terhadap hak asasi manusia. Pemanfaatan komunikasi sangat penting untuk menyelesaikan persoalan hak asasi manusia yang muncul dalam proyek pembangunan jalan lingkar Mandalika. Komunikasi yang efektif membantu:

- a. **Memahami Perspektif:** Mendengarkan perspektif masyarakat setempat, masyarakat adat, pekerja, dan organisasi-organisasi hak asasi manusia untuk memahami kekhawatiran dan kebutuhan mereka.
- b. **Transparansi:** Memastikan bahwa informasi mengenai proyek, termasuk dampaknya, tersedia secara terbuka dan transparan kepada semua pihak terkait.
- c. **Partisipasi:** Mendorong partisipasi aktif dari masyarakat setempat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek.
- d. **Penyelesaian Konflik:** Memfasilitasi dialog antara semua pihak yang mungkin memiliki konflik kepentingan dan mencari solusi bersama untuk masalah yang muncul.
- e. **Akuntabilitas:** Membuat mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan pemantauan terhadap pematuhan standar HAM dan dampak proyek.

Dengan komunikasi yang baik, proyek seperti Pembangunan Sirkuit Mandalika dapat menangani hak asasi manusia dengan lebih baik, menghasilkan manfaat ekonomi sekaligus melindungi hak-hak dasar semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pengembang proyek, dan masyarakat untuk turut serta dalam upaya mengatasi dan memitigasi hak asasi manusia dalam konteks proyek pembangunan besar seperti ini. Pemerintah dan masyarakat juga harus bersatu, saling transparan dan berkomunikasi dengan baik. Kasus dugaan HAM ini juga diakibatkan karena masalah komunikasi yang kurang baik antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi yang tidak terjalin dengan baik dapat menyebabkan banyak masalah dikemudian harinya. Jika diawal pemerintah dan masyarakat berkomunikasi dengan baik, mungkin isu HAM ini tidak akan timbul.

KESIMPULAN

Pada bagian ini memuat tujuan dan gagasan, tanpa menutup dari konsekwensi pembicaraan bahwa peristiwa-peristiwa terkait pembangunan Jalan Mandalika jelas-jelas masih menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang menunjukkan bahwa budaya Indonesia, termasuk warga negara, polisi, dan aparat pemerintah, sebenarnya tidak demikian. melihat kebebasan bersama yang sejati. . Tanggung jawab terbesarnya adalah setiap orang di depan umum harus mengingat kembali, terus-menerus memahami kewajiban mereka dalam menjalankan kebebasan mereka sehingga kebebasan umum dapat hidup dan bekerja dengan baik. Apa yang dimilikinya masih terbatas pada kebebasan umum orang lain, karena kebebasan dasar

akan berfungsi dengan baik dengan asumsi masyarakat terus-menerus memahami bahwa ada kebebasan dasar orang lain yang setara dengan kebebasan umum mereka dan harus dihormati. Regulasi dalam situasi ini mempunyai kemampuan sebagai instrumen yang sah bagi keamanan kebebasan dasar di Indonesia, khususnya. sebagai upaya yang halal, konsistensi, penerapan dan persyaratan harus bersifat wajib. Komponen tujuan yang tidak bias dan memberikan otorisasi atau disiplin kepada pelakunya sehubungan dengan keadilan yang sah dan dilaksanakan sesuai siklus sah yang relevan. Dalam situasi ini, korespondensi menjadi sangat penting antara dua pihak, antara pemerintah dan masyarakat. Tidak adanya korespondensi yang baik antara otoritas publik dan daerah akan menimbulkan permasalahan mulai sekarang. Karena adanya kesalahan pembacaan antara kedua pertemuan tersebut. Pentingnya korespondensi juga akan mendorong hubungan baik antara otoritas publik dan masyarakat. Karena pada dasarnya semua permasalahan dapat tersampaikan dengan baik dan membangun kesepakatan yang saling menguntungkan antara kedua pihak.

REFERENSI

- Adyatama, E. (2021). Pembangunan Sirkuit Mandalika Sisakan Kisah Sengketa Lahan dan Intimidasi. Tempo.Co. <https://nasional.tempo.co/read/1450490/pembangunan-sirkuit-mandalika-sisakan-kisah-sengketa-lahan-dan-intimidasi>
- Alvin Hamidah, N., Agus Santoso, A. P., Dewa Sakti, Evrilia Sifaul, Helmi Nugraheni, Maya Mukti, Amanda Sukma, Naura Hafizah, Putra Aditya, Safrida Aulia, Sherly Marlina, & Arista Putri. (2023). Penegakan HAM di Era Modernisasi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 459–463. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.406>
- Amanah, S. (2010). Peran Komunikasi Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. 08(1), 1–19.
- Anggoro, A. D. (2014). MEDIA, POLITIK dan KEKUASAAN. *Jurnal Aristo*, 2(2), 25–52.
- Anggriana, E. (2017). Implementasi Model Komunikasi “Shannon And Weaver” Melalui Penyebaran Informasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) Di Kabupaten Donggala. *Social Humanity:Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 38–45.
- Anggriana, E. (2017). Implementasi Model Komunikasi “Shannon And Weaver” Melalui Penyebaran Informasi Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS-PBI) Di Kabupaten Donggala. *Social Humanity:Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 38–45.
- Bbc.com<https://www.bbc.com/sport/northern-ireland/59363110>
- Drew, C. (2023). Model Komunikasi Shannon Weaver – 7 Konsep Utama. *Helpfulprofessor.Com*. <https://helpfulprofessor.com/shannon-weaver-model/>
- Ham, P. (2023). PELANGGARAN HAM Informatika Fakultas Teknologi Informasi dan Sains Data. May.
- Imarshan, I. (2021). Popularitas Podcast Sebagai Pilihan Sumber Informasi Bagi Masyarakat Sejak Pandemi Covid-19. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis*, 5(2), 213. <https://doi.org/10.24853/pk.5.2.213-221>
- Luas, A. F., Sondakh, M., & Londa, J. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Dalam Menunjang Program Pengurangan Kemasan Plastik Pada Masyarakat Kelurahan Tosuraya Barat. *Acta Diurna Komunikasi*, 2(1), 5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/27106>
- Mulyana, D. (2005). *Komunikasi Efektif: Suatu Pendekatan Lintas Budaya*. PT Remaja Rosdakarya.
- Musfialdy, & Anggraini, I. (2020). Kajian Sejarah Dan Perkembangan Teori Efek Media. *Jurnal Komunikasi Dan Bisnis*, 8(1), 30–42. <https://doi.org/10.46806/jkb.v8i1.639>
- Samsol, S., Setiati, R., Wijayanti, P., & Ginting, M. (2021). Pelatihan Pengolahan Sederhana Limbah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak Di Desa Petir, Serang – Banten. *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia (JAMIN)*, 3(2), 169–174. <https://doi.org/10.25105/jamin.v3i2.10382>
- Subaidi, A. (2023, October 3). Persiapan sirkuit Mandalika menjelang MotoGP 2023. *antarafoto.com*. <https://www.antarafoto.com/id/view/2071044/persiapan-sirkuit-mandalika-menjelang-motogp-2023>
-